



**PEMERINTAH
PROVINSI JAWA BARAT**

LAPORAN KEUANGAN
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI JAWA BARAT
TAHUN 2016
(UN AUDITED)



DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
JL. ASIA AFRIKA NO. 146 BANDUNG
TLP. 022-4230897 FAX. 022-4200331-4230929

KATA PENGANTAR

Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pimpinan OPD selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan OPD yang dipimpinnya. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah, Laporan Keuangan OPD yang meliputi Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan disampaikan kepada Gubernur melalui PPKD dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat adalah entitas akuntansi dari Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan menyusun laporan keuangan berupa Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan laporan keuangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan peraturan perundang-undangan lainnya di bidang pengelolaan keuangan daerah.

Sehubungan dengan Laporan Keuangan Tahun 2016 ini, perlu kami kemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Neraca menyajikan informasi tentang posisi Aset, Kewajiban, dan Ekuitas OPD.
2. Laporan Realisasi Anggaran memberikan informasi tentang realisasi Pendapatan-LRA, Belanja, dan Pembiayaan.
3. Laporan Operasional menunjukkan informasi Pendapatan-LO dan Beban.
4. Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari Ekuitas Awal, Surplus/(Defisit)-LO, Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar, dan Ekuitas Akhir.
5. Catatan atas Laporan Keuangan memberikan uraian tentang kebijakan akuntansi, dan penjelasan pos-pos laporan keuangan, daftar rinci atau uraian atas nilai pos yang disajikan dalam Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar pengguna laporan keuangan dapat memperoleh informasi yang lebih lengkap tentang hal-hal yang termuat dalam laporan keuangan.

Kami menyadari bahwa Laporan Keuangan Tahun 2016 ini masih belum sempurna. Oleh sebab itu, kami mengharapkan tanggapan, saran, maupun kritik yang membangun dari para pengguna laporan keuangan ini. Kami akan terus berupaya untuk dapat menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang tepat waktu dan akurat sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Diharapkan penyusunan Laporan Keuangan ini dapat meningkatkan akuntabilitas publik.

Bandung, 16 Januari 2017

KEPALA
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI JAWA BARAT,



Dr. HENING WIDIATMOKO, MA
Pembina Utama Madya
NIP. 19640831 199003 1 008

RINGKASAN

Berdasarkan Pasal 295 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pimpinan OPD selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan OPD yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan kepada Gubernur melalui PPKD dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Selanjutnya, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah bahwa mulai tahun 2015 Laporan Keuangan OPD terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan Keuangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat ini belum diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (*Unreviu*). Laporan Keuangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 *Unaudited* ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Lampiran I.

Laporan Keuangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 *Unaudited* ini disusun dari laporan keuangan seluruh satuan kerja yang berada di bawah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat.

1. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal pelaporan dan dibandingkan dengan tanggal pelaporan sebelumnya.

Jumlah Aset adalah sebesar **Rp 123.198.175.082,27** yang terdiri dari Aset Lancar sebesar **Rp 209.541.357,00** Aset Tetap sebesar **Rp 122.988.633.725,27** dan Aset Lainnya sebesar **Rp 0**

Jumlah Kewajiban adalah sebesar **Rp 120.060.513,00** yang seluruhnya merupakan Kewajiban Jangka Pendek.

Sementara itu jumlah Ekuitas adalah sebesar **Rp 123.078.114.569,27**

Ringkasan Neraca dapat disajikan sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2016	31 Desember 2015 (Audited)
Aset Lancar	209.541.357,00	452.671.590
Aset Tetap	122.988.633.725,27	126.652.638.402,36
Aset Lainnya	0	2.425.657.340,34
Jumlah Aset	123.198.175.082,27	129.530.967.332,70
Kewajiban Jangka Pendek	0	0
Utang Belanja	120.060.513,00	137.199.041,00
Jumlah Kewajiban	120.060.513,00	137.199.041,00
Ekuitas	123.078.114.569,27	129.393.768.291,70
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	123.198.175.082,27	129.530.967.332,70

2. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2016 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja, selama periode 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016.

Realisasi Pendapatan-LRA pada Tahun Anggaran 2016 adalah sebesar **Rp 10.050.944.704,00** atau sebesar **95.06 persen** dari yang dianggarkan sebesar **Rp 10.573.573.300,00** Jumlah realisasi Pendapatan-LRA tersebut seluruhnya berasal dari Pendapatan Asli Daerah-LRA.

Realisasi Pendapatan Asli Daerah-LRA pada Tahun Anggaran 2016 terdiri dari Pendapatan Pajak Daerah-LRA sebesar **Rp 0** atau mencapai **0 persen** dari yang dianggarkan, Pendapatan Retribusi Daerah-LRA sebesar **Rp 10.050.944.704,00** atau mencapai **95.06 persen** dari yang dianggarkan, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LRA sebesar **Rp 0** atau mencapai **0 persen** dari yang dianggarkan, serta Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LRA sebesar **Rp 0** atau mencapai **0 persen** dari yang dianggarkan

Realisasi Belanja pada Tahun Anggaran 2016 adalah sebesar **Rp 114.011.316.369,00** atau mencapai **92.03 persen** dari yang dianggarkan sebesar **Rp 123.881.506.500,00** Jumlah realisasi Belanja tersebut terdiri dari realisasi Belanja Operasi sebesar **Rp 110.652.536.657,00** atau **91.99 persen** dari yang dianggarkan dan Belanja Modal sebesar **Rp 3.358.779.712,00** atau **93.36 persen** dari yang dianggarkan.

Dari realisasi Pendapatan-LRA sebesar **Rp 10.050.944.704,00** dan Belanja sebesar **Rp 114.011.316.369,00** diperoleh Defisit-LRA sebesar **Rp (103.960.371.655,00)** sehingga mengakibatkan adanya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran 2016 sebesar **Rp (113.307.933.200,00)**

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2016 dan Tahun Anggaran 2015 dapat disajikan sebagai berikut (dalam rupiah):

Uraian	Tahun Anggaran 2016		Tahun Anggaran 2015 (Audited)	
	Anggaran Perubahan	Realisasi	Anggaran Perubahan	Realisasi
Pendapatan-LRA	10.573.573.300	10.050.944.704	15.650.000.000	16.230.904.970
Pendapatan Asli Daerah-LRA	10.573.573.300	10.050.944.704	15.650.000.000	16.230.904.970
Pendapatan Pajak Daerah-LRA	0	0	0	0
Pendapatan Retribusi Daerah-LRA	10.573.573.300	10.050.944.704	15.650.000.000	16.230.904.970
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LRA	0	0	0	0
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LRA	0	0	0	0
Belanja	123.881.506.500	114.011.316.369	142.345.224.020	122.775.446.591
Belanja Operasi	120.283.810.500	110.652.536.657	114.871.842.883	99.260.501.820
Belanja Modal	3.597.696.000	3.358.779.712	27.473.381.137	23.514.944.771
Surplus/(Defisit)-LRA	(113.307.933.200)	(103.960.371.665)	(126.695.224.020)	(106.544.541.621)

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menunjukkan kinerja sesungguhnya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat dalam tahun anggaran 2016. Pendapatan-LO Tahun Anggaran 2016 sebesar **Rp 11.558.091.114,00** Beban Tahun Anggaran 2016 sebesar **Rp 120.637.941.093,13** Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Tahun Anggaran **Rp 2.307.229.757,00**, dan Defisit-LO Tahun Anggaran 2016 sebesar **Rp 111.387.079.736,13**

Ringkasan Laporan Operasional Tahun Anggaran 2016 adalah sebagai berikut:

Uraian	Tahun Anggaran 2016	Tahun Anggaran 2015 (Audited)
Pendapatan-LO	11.558.091.114,00	16.231.118.220
Beban	120.637.941.093,13	107.252.477.559,86
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional	(109.079.849.979,13)	(91.021.359.339,86)
Surplus dari Kegiatan Non Operasional	0	0
Defisit dari Kegiatan Non Operasional	2.307.229.757,00	0
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	2.307.229.757,00	0
Pos Luar Biasa	0	0
Surplus/(Defisit)-LO	(111.387.079.736,13)	(91.021.359.339,86)

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/(defisit)-LO, koreksi dan ekuitas akhir.

Ekuitas Awal Tahun Anggaran 2016 sebesar **Rp 129.393.768.291,70**, Defisit-LO Tahun Anggaran 2016 sebesar **Rp 111.387.079.736,13** RK PPKD Tahun Anggaran 2016 sebesar **Rp 103.960.371.665,00** RA PPKD Nilai Perolehan Tahun Anggaran 2016 sebesar **Rp 1.116.152.285,00** RA PPKD Akumulasi Penyusutan Tahun Anggaran 2016 sebesar **Rp. -5.097.836,30** Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar Tahun Anggaran 2016 sebesar **Rp -100,00** dan Ekuitas Akhir Tahun Anggaran 2016 sebesar **Rp 123.078.114.569,27**

Ringkasan Laporan Perubahan Ekuitas Tahun Anggaran 2016 adalah sebagai berikut:

Uraian	Tahun Anggaran 2016	Tahun Anggaran 2015 (Audited)
Ekuitas Awal	129.393.768.291,70	166.552.249.214,45
Surplus/(Defisit)-LO	(111.387.079.736,13)	(91.021.359.339,86)
RK PPKD	103.960.371.665,00	106.544.514.721,00
RA PPKD (Nilai Perolehan)	1.116.152.285,00	11.550.000,00
RA PPKD (Akumulasi Penyusutan)	(5.097.836,30)	0
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar Defisit dari Kegiatan Non Operasional	(100,00)	(52.693.213.303,89)

Uraian	Tahun Anggaran 2016	Tahun Anggaran 2015 (Audited)
Ekuitas Akhir	123.078.114.569,27	129.393.768.291,70

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) meliputi penjelasan atau daftar terinci atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. CaLK juga menguraikan dasar hukum, metodologi penyusunan laporan keuangan, dan kebijakan akuntansi yang diterapkan. Selain itu, CaLK juga mengungkapkan informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran, pendapatan-LRA, belanja, dan pembiayaan diakui berdasarkan basis kas, yaitu diakui pada saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari Kas Umum Daerah. Sementara itu, dalam penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas, pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas diakui berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari Kas Umum Daerah.

Dalam CaLK ini diungkapkan pula kejadian penting setelah tanggal pelaporan keuangan serta informasi tambahan yang diperlukan.